

# **ALTERNATIF PENDANAAN**

**Disampaikan pada kegiatan  
SDGs Annual Conference 2018  
17 Desember 2018**

**Sri Bagus Guritno  
Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun  
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional**

## Alokasi Pada Prioritas

### Pasal 1

**Proyek Prioritas** adalah proyek yang dilaksanakan oleh **Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha** yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian **prioritas pembangunan**.

**Holistik  
Integratif  
Tematik  
Spasial**

## Integrasi Sumber-Sumber Pendanaan

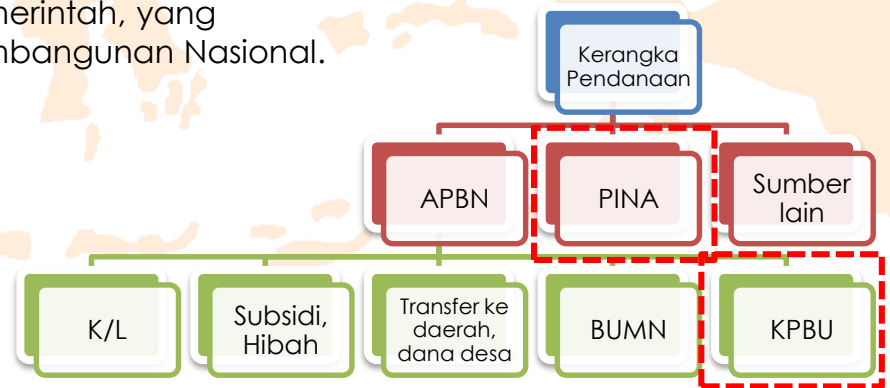
### Pasal 4 ayat 1

**Kerangka Pendanaan** dilakukan melalui **pengintegrasian sumber pendanaan**, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional.

### Hal baru di RKP 2019

Integrasi pendanaan yang bersumber dari :

- Subsidi/Hibah (kebijakan)
- BUMN (proyek prioritas)
- KPBU (proyek prioritas)
- PINA (proyek prioritas)

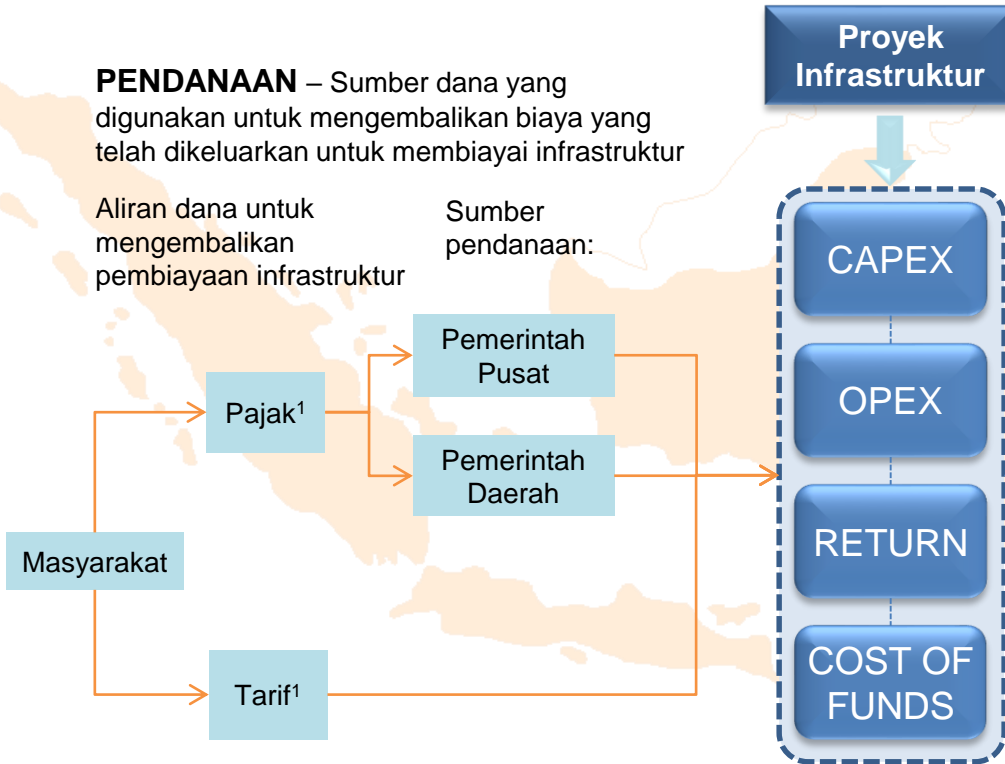


# Pembiayaan dan Pendanaan

**PENDANAAN** – Sumber dana yang digunakan untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai infrastruktur

Aliran dana untuk mengembalikan pembiayaan infrastruktur

Sumber pendanaan:

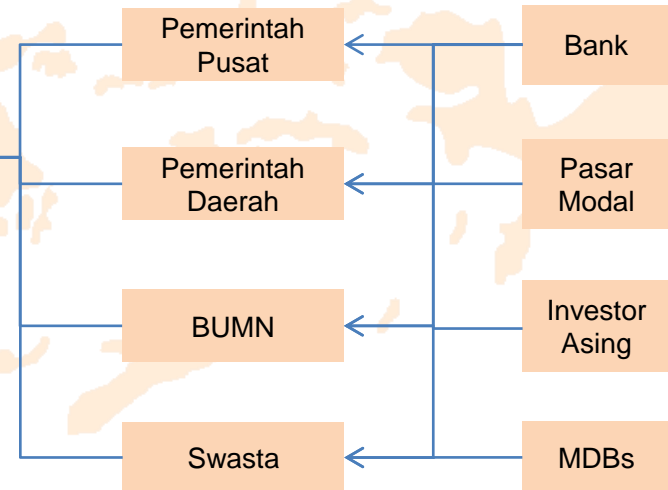


<sup>1</sup> Dapat dikombinasikan antara pajak dan tarif

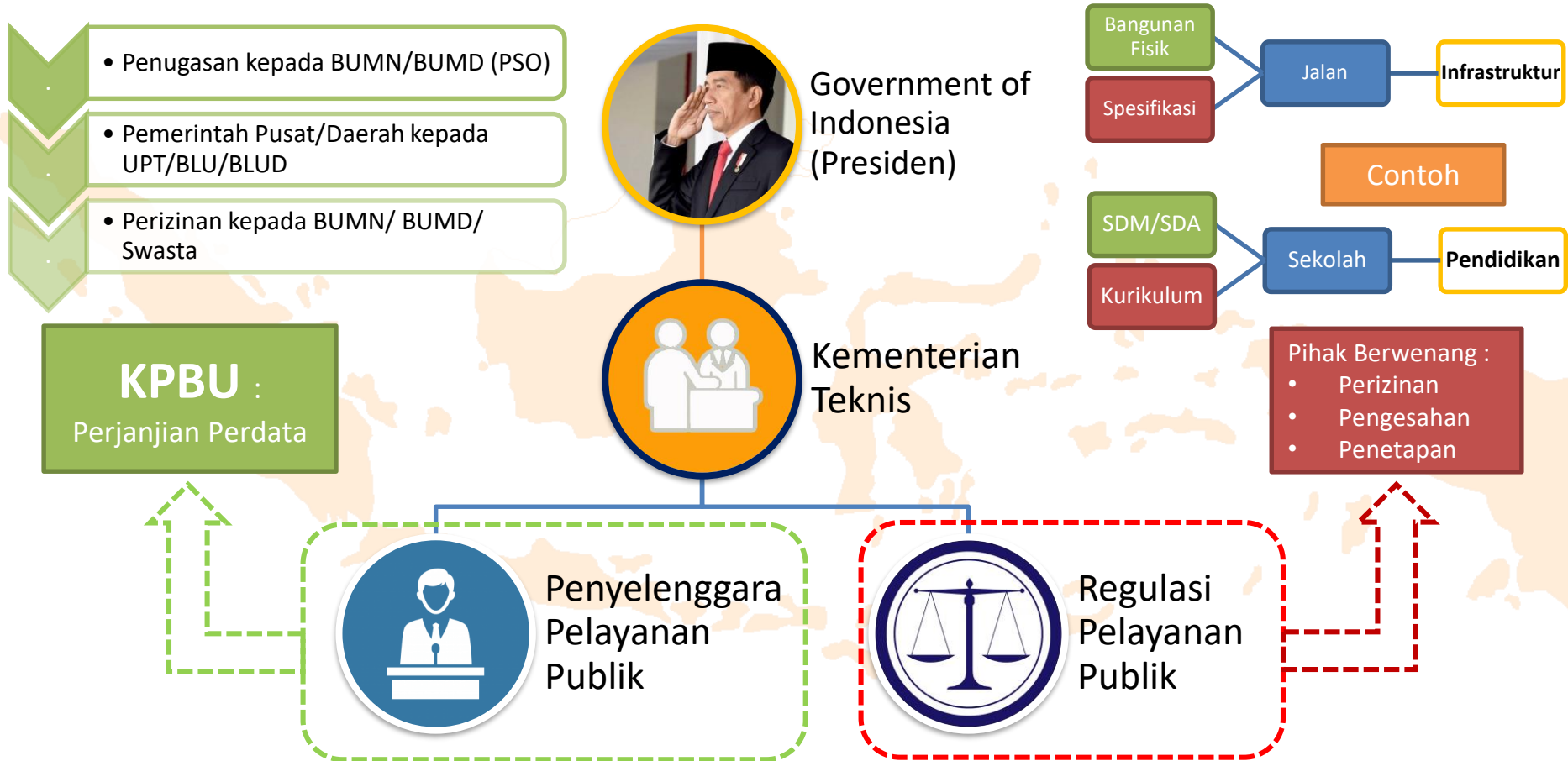
**PEMBIAYAAN** – Biaya yang digunakan untuk membiayai infrastruktur

Sumber Pembiayaan:

Institusi yang memberikan pembiayaan:



# Posisi KPBU pada Pelayanan Publik



# Pengertian KPBU

## KONVENSIONAL

### KEWAJIBAN PEMERINTAH MELAYANI MASYARAKAT



### PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

PEMBENTUKAN  
ASET  
(Pemerintah)

PELAYANAN  
MASYARAKAT

- Bukan privatisasi tetapi pengelolaan aset melalui konsesi
- Dapat berupa kegiatan yang memiliki arus pendapatan (palapa ring), tidak memiliki pendapatan (jalintim)

PERUBAHAN  
PARADIGMA

## KPBU

### KEWAJIBAN PEMERINTAH MELAYANI MASYARAKAT



### PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR



### POKOK PEMAHAMAN KPBU

KERJASAMA PEMERINTAH & BADAN USAHA	KEPENTINGAN UMUM	SPESIFIKASI YG TELAH DITETAPKAN PJPK	SUMBER DAYA SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DARI BADAN USAHA	PEMBAGIAN RISIKO

### Manfaat KPBU:

- **On schedule, on budget, on service**
  - Kesinambungan perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan.
  - Mengatasi keterbatasan kapasitas pelaksanaan.
- Dengan dana yang sama, bisa me-leverage proyek yang lebih banyak

# Regulasi KPB dalam Penyediaan Infrastruktur

Aspek	Pengaturan	
	<u>Pemerintah</u>	<u>Badan Usaha</u>
Subyek Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri</li> <li>2. Kepala Lembaga</li> <li>3. Kepala Daerah</li> <li>4. BUMN/BUMD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BUMN/BUMD</li> <li>2. Badan Usaha Asing</li> <li>3. Perseroan Terbatas</li> <li>4. Koperasi</li> </ol>
Obyek Kerjasama	Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Sosial (19 Jenis Infrastruktur)	
Kontribusi Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembiayaan Sebagian KPB</li> <li>2. Dukungan pemerintah</li> <li>3. Jaminan pemerintah</li> </ol>	
Pengembalian investasi Badan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif (<i>User Charge</i>).</li> <li>2. Pembayaran ketersediaan layanan (<i>Availability Payment</i>).</li> <li>3. Bentuk lain sepanjang tidak bertentangan dengan Perundang-undangan.</li> </ol>	
Tahapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahap Perencanaan</li> <li>2. Tahap Penyiapan</li> <li>3. Tahap Transaksi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Konstruksi</li> <li>5. Masa Konsesi</li> </ol>





# Private Sector Contribution: 19 Sector PPP Projects Supporting SDGs



Public Housing



Electricity



Road



Area



Educational Facilities



Urban Facilities



Prison



Sports Facilities, Art and Culture



Oil, Gas and Renewable Energy



Transportation



Tourism



Health



Energy Conservation



Information and Communication Technology



Drinking Water



Trash Management

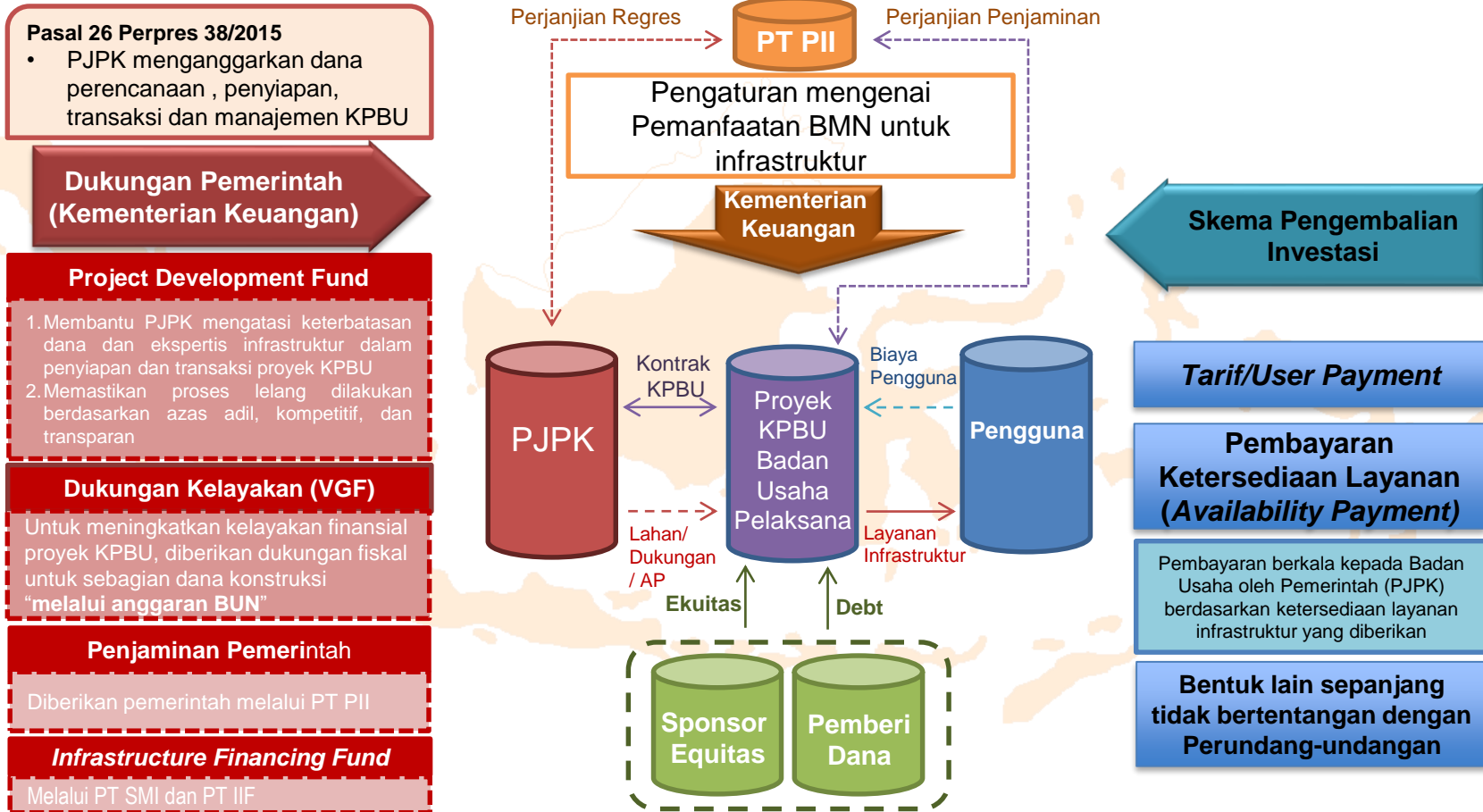


Centralized Waste Water Resources and Irrigation



Local Waste Management

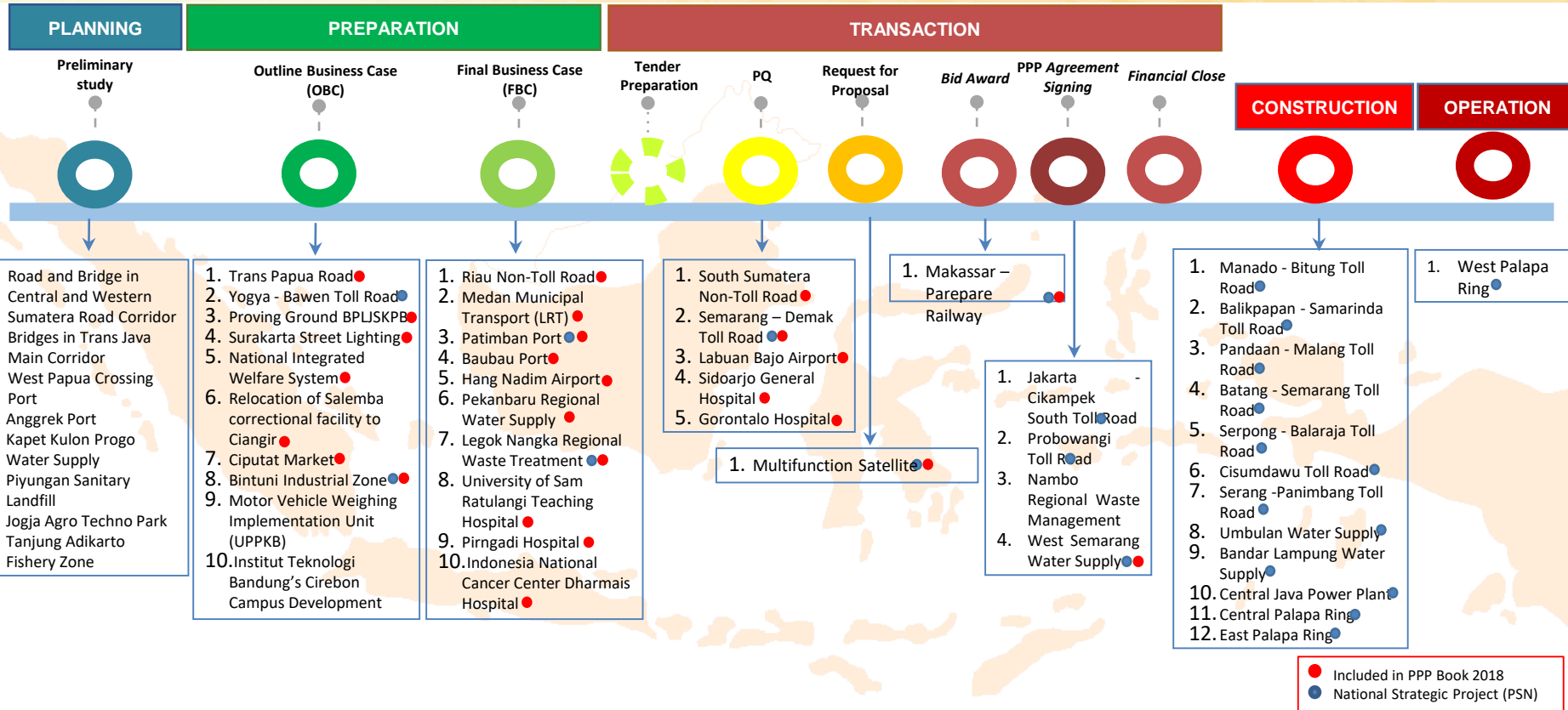
# Struktur Umum KPBU





# Solicited PPP Project Pipeline

1 under operation project, 12 under construction projects, and 39 on progress projects



Data per 14/12/2018

TOTAL: USD 3,375 M + 11 Projects Under Calculation

TOTAL: USD 4,400 M

TOTAL: USD 8,829 M

TOTAL: USD 87.6M

# TERIMA KASIH



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



IIGF



PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)  
Indonesia Infrastructure Guarantee Fund

## KANTOR BERSAMA KPBU REPUBLIK INDONESIA

*PPP Office Government of Indonesia*



**Koordinasi**



**Fasilitasi**



**Capacity  
Building**



**Percepatan  
Pelaksanaan  
KPBU di  
Indonesia**



**Kantor Bersama KPBU Republik  
Indonesia**  
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia  
(Persero)  
Capital Place, 7th & 8th Floor  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18,  
Jakarta 12710 - Indonesia

# Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian



Perencanaan  
Awal untuk  
Komposisi

- Financing
- Funding



Survey and  
Demand untuk

- Willingness to Pay
- Ability to Pay



Kelayakan  
Penetapan  
Tarif



# SUMBER PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN SPAM

## (PP No.122/2015)

**Dana Masyarakat**

**Rp**

**BUMN/BUMD**

Dapat melakukan kerjasama  
dengan Badan Usaha Swasta\*

**Rp**



**Rp**

**APBN/APBD**

Pinjaman, hibah, subsidi,  
penyertaan modal

**Rp**

**Sumber dana lain  
sesuai dengan UU**

### **\*Ruang lingkup kerjasama:**

- Pengembangan/pengelolaan unit air baku/produksi
- Unit distribusi untuk dikelola oleh BUMN/BUMD
- Teknologi O&M

### **Bentuk kerjasama:**

- B2B
- Skema KPBU

# Latar Belakang dan Tujuan Proyek

- Tujuan :
  - Memanfaatkan air Sumber Umbulan 4.000 lt/dt untuk kebutuhan air minum masyarakat.
  - Membangun Proyek KPS-SPAM Umbulan dengan pola “Bangun Guna Serah” (BOT).
  - Terbangunnya Sistem Produksi dan Sistem Pipa Transmisi ke 5 wilayah Kabupaten/Kota
  - Terpenuhinya penyediaan air minum bagi PDAM di 5 Wilayah Kabupaten/Kota
- Manfaat :
  - Pemenuhan kebutuhan air minum bagi 1.300.000 jiwa ( $\pm 260$  ribu sambungan rumah) pada tahun 2020.
  - Dukungan capaian target RPJMN terhadap pelayanan air minum pada tahun 2019 adalah 100%

Kewajiban Pemerintah Untuk Menyediakan Air Minum Bagi Masyarakat.

Penyediaan air minum di 5 Kab/Kota belum mencukupi & sumber air yg ada terbatas.

Potensi Sumber Air Umbulan dgn Debit  $\pm 5.000$  Ltr/dt dan kualitas airnya layak minum belum dimanfaatkan secara optimal.

**Rencana Pemanfaatan Mata Air Umbulan**